

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Golongan Karya ialah partai yang besar dan mempunyai sejarah panjang di Indonesia, partai Golkar telah menunjukkan eksistensinya di pemilihan umum legislatif Kabupaten Labuhanbatu mulai dari periode 2004 hingga periode 2014. partai Golkar sendiri meraih kemenangan di masing masing periode dengan menempatkan wakil - wakilnya sebanyak 11 dan 7 kursi, dengan hasil tersebut partai Golkar menjadi partai pemenang di dua periode tersebut. Namun berbeda dengan halnya di pemilihan legislatif periode 2014 – 2019 partai Golkar mengalami kemunduran yang sangat signifikan yaitu perolehan suara partai hanya berada di peringkat ketiga (3) dengan perolehan suara sah sebanyak 27.603 dan hanya menempatkan 5 wakilnya di DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Kegagalan Partai Golkar tersebut penulis mengambil kesimpulan awal dikarenakan adanya salah strategi yang diterapkan oleh partai Golkar, yaitu tidak tepatnya penempatan calon legislatif yang akan diusung.

Seperti yang diketahui partai politik ialah merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita, sebagai lembaga politik, partai

bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara dan ia baru ada di negara modern.¹

Di Republik Indonesia terdapat macam - macam pemilu, dimulai dari pemilihan umum presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Dari beberapa pemilu tersebut, penulis akan membahas tentang pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di seluruh wilayah Indonesia yaitu diwilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan undang undang republik Indonesia dan pancasila yang dilaksanakan dengan jujur, adil, damai dan bersih yang untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum legislatif ini tentu menjadikan sarana sebagai pembelajaran politik bagi setiap warga negara yang menggunakan hak pilihnya masing – masing.

Dewasa ini Indonesia yang menganut sistem demokrasi, tentu merupakan sistem yang berbasis persaingan antara partai politik, persaingan politik yang ada merupakan suatu hal yang wajar dalam dunia politik, karena persaingan politik tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi. Menghilangkan persaingan politik berarti secara tidak langsung telah menyeret sistem politiknya menjadi sebuah sistem yang

¹Miriam budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008, hal 397

otoriter dan absolut. Dengan adanya sistem demokrasi tentu akan adanya partai - partai politik yang akan menunjang perpolitikan yang ada di Indonesia.

Partai Golkar sebelumnya bernama Golongan Karya (GOLKAR) dan Sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya sekber Golkar pada massa - massa akhir pemerintahan presiden soekarno, tepatnya 1964 oleh angkatan darat untuk menandingi pengaruh PKI dalam kehidupan politik, dalam perkembangannya Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu dalam pemilu 1971 (pemilu pertama dalam pemerintahan orde baru presiden soeharto) salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada pemilu-pemilu pemerintahan orba lainnyayaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan karena pemerintahan soeharto membuat kebijakan – kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar seperti peraturan monoloyalitas PNS dan sebagainya.

Setelah pemerintahan soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi partai Golongan Karya (GOLKAR) dan untuk pertama kalinya mengikuti pemilu tanpa adanya bantuan kebijakan – kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan soeharto. Pada pemilu 1999 yang diselenggarakan presiden habibie perolehan suara partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDIP yang dipimpin oleh ibu megawati soekarno putri.

Seiring berjalannya waktu ketidakpuasan terhadap pemerintahan megawati soekarno putri menjadi salah satu sebab para pemilih di pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Golkar, selain partai - partai lainnya seperti partai Demokrat, partai Kebangkitan Bangsa dan lain – lain. Partai Golkar menjadi pemenang pemilhan umum (pemilu) legislatif tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58 % dari keseluruhan suara sah. Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi partai Golkar karena pada pemilu legislatif 1999, PDIP mendominasi perolehan suara.²

Dengan kemenangan partai Golkar di pemilihan umum legislatif tahun 2004 yang pada tingkat nasional, tentunya itu tidak terlepas dari perolehan – perolehan suara partai Golkar ditingkat politik lokal (daerah) yang ada di seluruh Indonesia, tak terkecuali contohnya di Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara Indonesia, ibu kota Kabupaten ini terletak di Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet.

Pemilihan legislatif yang ada di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2004 dimenangkan oleh partai Golkar yang pada saat itu partai Golkar memperoleh suara sebanyak 98.602 suara yang diikuti oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dan partai persatuan pembangunan (PPP) dengan suara masing - masing 69.895 dan 53.201 suara. Partai Golkar menempatkan calon legislatifnya duduk 11

²http://id.wikipedia.org/wiki/partai_golongan_karya. (Senin 5 oktober 2015 pukul 03.18)

kursi terbanyak dari partai lain, tentu dengan banyaknya kursi yang dimiliki oleh partai pemenang yaitu partai Golkar jelas mendapatkan jatah kursi ketua DPRD dan dengan banyaknya kursi akan memudahkan fraksi Golkar dalam mengambil suara keputusan yang nantinya akan mengambil keputusan – keputusan yang bersifat membela rakyat.

Setelah waktu periode pemilihan legislatif 2004 – 2009 habis masa periode, sehingga rotasi politik yang untuk mengisi jabatan perwakilan rakyat otomatis akan dilakukan pergantian dengan periode selanjutnya yaitu 2009 – 2014. Pemilihan legislatif pada periode 2009 – 2014 di Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan damai, para partai politik masing – masing menyiapkan caleg terbaiknya dan strategi – strategi oleh partai tersebut, tak terkecuali partai Golkar, bagaimana tidak partai Golkar yang pada periode sebelumnya adalah partai pemenang yang harus bisa mempertahankannya. Dan setelah dilakukan pemilihan legislatif pada periode 2009 – 2014, seperti banyak diprediksi kembali lagi partai Golkar tampil sebagai partai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 58.041 diikuti oleh partai Demokrat dan partai demokrasi perjuangan Indonesia (PDIP) yang masing – masing 52.414 dan 50.174. dimasa periode ini partai Golkar yang tampil sebagai pemenang menempatkan 7 calegnya yang lebih banyak dari partai lainnya, tentu dengan tampil sebagai partai pemenang jatah kursi ketua DPRD akan menjadi kembali jatah partai Golkar.

Setelah masa periode 2009 – 2014, dilakukannya rotasi politik pemilihan legislatif di periode 2014 – 2019, partai Golkar yang sangat eksis dikabupaten Labuhanbatu selama 10 tahun mulai dari periode 2004 hingga 2014 harus mengakui kemunduran yang dialami partainya di periode 2014 – 2019, bagaimana tidak partai Golkar hanya mampu menduduki peringkat ketiga dalam perhitungan suara akhir sebanyak 27.603 dengan menempatkan 5 kursi sedangkan partai pemenang di periode ini yang dimenangkan oleh partai demokrasi perjuangan Indonesia (PDIP) dengan 31.001 dengan menempatkan 6 kursi dan partai Demokrat 21.703 (6 kursi).

Tabel 1.1

Perbandingan Perolehan Suara Golkar Dalam Tiga Periode Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Labuhanbatu

| NO | Partai politik | 2004 – 2009 | | 2009 - 2014 | | 2014 - 2019 | |
|----|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Perolehan suara | Jumlah Kursi | Perolehan Suara | Jumlah Kursi | Perolehan Suara | Jumlah Kursi |
| 1 | Golkar | 98.602 | 11 | 58.041 | 7 | 27.837 | 5 |
| 2 | PDIP | 69.895 | 6 | 50.174 | 5 | 31.390 | 6 |
| 3 | Demokrat | 44.101 | 4 | 52.414 | 5 | 21.703 | 6 |

Sumber : Berita acara komisi pemilihan umum kabupaten labuhanbatu

Terlihat pada tabel diatas kemenangan dua kali partai Golkar dalam pemilu 2004 hingga 2014, tidak diikuti dengan periode 2014 – 2019 yang harus menduduki peringkat ketiga. Dengan beradanya Golkar peringkat ketiga bisa dikatakan Golkar pada periode ini mengalami kemunduran pada pemilu legislatif di periode 2014. Tentu dengan kegagalannya partai Golkar pada periode 2014 – 2019 menarik untuk diteliti, dikarenakan faktor apa saja yang membuat partai Golkar merosot di peringkat ketiga yang seperti kita ketahui partai Golkar sangat eksis 10 tahun dikabupaten Labuhanbatu.

Hal – hal yang telah dipaparkan diatas menarik perhatian peneliti melakukan pengkajian faktor kegagalan partai Golkar dalam pemilihan umum legislatif pada pemilu 2014.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya adalah :

Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum legislatif Labuhanbatu tahun 2014 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Partai Golkar adalah partai yang memenangkan pemilu legislatif di kabupaten Labuhanbatu dari periode 2004 hingga 2014 sedangkan pada periode 2014 – 2019 partai Golkar mengalami kemunduran yang hanya duduk di peringkat ketiga, maka dari itu sangatlah menarik untuk diteliti mengapa partai Golkar bisa mengalami kemunduran dan apa yang menyebabkan kemunduran tersebut pada pemilu 2014 , kemudian apa yang bisa kita ambil dari penelitian ini.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab kegagalan partai Golkar dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2014.
- 2) Untuk menjawab berbagai macam masalah yang berhak diketahui dalam perpolitikan yang ada di Indonesia khususnya dalam tingkat lokal.

2. Manfaat penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah wacana/pengetahuan terutama dibidang ilmu sosial dan politik.

- 2) Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan nantinya dapat memberi kontribusi dalam hal pembelajaran membenahi partai politik khususnya

dalam hal strategi pemenangan ataupun penyebab kegagalan yang ada didalam partai Golkar.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Politik

Partai politik pertama - tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja³.

Di Indonesia partai politik merupakan hal yang baru dan yang masih terbilang sangat muda dikarenakan baru baru muncul pada era colonial belanda pada abad ke 20. Pada era inilah partai – partai di Indonesia dibentuk yang untuk berbagai kepentingan – kepentingan seperti : pertama partai dibentuk untuk mencari identitas nasional dan merumuskannya, yang mana pada saat itu identitas nasional yang dibawah kepemimpinan colonial belum ada terbentuk sehingga sulit untuk

³ Budiardjo, Ibid Hal 397

memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua terbentuknya partai di Indonesia adalah untuk memperkuat perjuangan yang untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa yang telah di kuasai oleh colonial.

Karena itu tidak mengherankan jika ideologi-ideologi besar seperti islamisme, nasionalismedan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional, Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok dan atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai pada era colonial turut memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus “penemuan” identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan Republik. Sebagian besar pendiri bangsa, seperti HOS tjokroaminoto, Tjipto mangunkusumo, Sukarno, dan Hatta adalah juga pendiri sekaligus pemimpin partai pada zamannya⁴.

Sebelum beranjak pada pengertian partai politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai kegiatan – kegiatan yang mempengaruhi, mencari, dan mempertahankan kekuasaan yang dalam kehidupan masyarakat.

1.1 Definisi Partai Politik

Untuk lebih mengenal lagi apa itu partai politik, maka akan dijelaskan mengenai definisi-definisi partai politik menurut beberapa ahli. Secara umum dapat

⁴ Syamsuddin Haris, *PARTAI, PEMILU, dan, PARLEMEN ERA REFORMASI*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia hal 21

dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya⁵. Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli.

Beikut ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahil ilmu klasik dan kontemporer⁶.

“Menurut Carl J. Friedrich : Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

“Menurut Sigmund Neumann mengemukakan definisi sebagai berikut: Partai *politik* adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

“Menurut Giovanni Sartori, Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

⁵ Budiardjo, Op cit hal 403

⁶ Budiardjo, Ibid hal 404 - 405

Sedangkan Inu Kencana Syafii mengatakan partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat negara⁷.

Dalam undang-undang pengertian partai politik di jelaskan dalam undang-undang no.12 tahun 2002 yaitu sebagai berikut :“Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum”

Bisa disimpulkan partai politik adalah organisasi yang dibuat oleh warga Negara yang secara sukarela yang berusaha untuk menduduki suatu jabatan atau suatu kekuasaan yang untuk memperjuangkan kepentingan anggota maupun bangsa dan negara.

1.2 Asal – Usul Partai Politik

Berikut ini Ichlasul Amal⁸ mengemukakan mengenai asal usul partai politik yakni :

⁷ Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Politik*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, Hal : 317

⁸ Ichlasul Amal, *Teori – Teori Mutakhir Partai Politik (edisi revisi)*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta 1996. Hal 2 dan 8

- 1) Partai yang tumbuh dalam lingkungan intra-parlemen, adalah pembentukan oleh kelompok – kelompok parlemen, kemudian diikuti dengan munculnya komite – komite pemilihan dan akhirnya berkembang menjadi suatu hubungan permanen antara kedua elemen tersebut.
- 2) Partai yang terbentuk diluar lingkungan parlemen, adalah pembentukan oleh kelompok – kelompok dan asosiasi asosiasi yang bervariasi, seperti halnya kelompok kegiatan serikat buruh.

Ramlan surbakti (2010)⁹ menyatakan ada tiga teori yang menjelaskan tentang asal usul partai politik:

- 1) Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
- 2) Teori situasi historis terjadi manakala suatu partai mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks.
- 3) Melihat madernisasi social ekonomi seperti : pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industralisasi, urbanisas, perluasan kekuasaan Negara seperti

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010. Hal :144-146

birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

Sedangkan Koirudin (2004)¹⁰ menyatakan, asal usul terbentuknya partai politik yakni :

- 1) Partai politik didirikan sebagai upaya memperbaiki legitimasi, adapun keterkaitan antara berdirinya partai dengan upaya memperbaiki krisis legitimasi ini adalah karena terdapat kecenderungan perubahan dasar legitimasi.
- 2) Terbentuknya partai politik dikarenakan adanya krisis integritas, kemunculan partai politik dimaksudkan untuk mengatasi integrasi, terutama apabila partai politik memiliki basis dukungan yang lintas wilayah.
- 3) Partai politik muncul yaitu dengan adanya krisis partisipasi telah membawa perubahan – perubahan besar di bidang sosial , ekonomi, dan sistem stratifikasi. Akibatnya, penguasa yang sudah kehilangan legitimasi juga kehilangan partisipasi rakyat. Kemudian melalui partai politik lah rakyat bisa lebih berperan di dalam menentukan kebijakan negara.

¹⁰ Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 Hal 24

1.3 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologi oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial individu (fasis)¹¹.

Namun, selain itu Ramlan surbakti (2010)¹² juga menyatakan partai politik juga melaksanakan fungsi lain. Berikut ini adalah fungsi – fungsi dari partai politik :

a) Sosial Politik

Sosialisasi politik sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh sebuah partai politik dikarenakan dengan sosialisasi politik masyarakat bisa atau dapat mengenal para kader partai maupun suatu partai tersebut dan bisa juga menjadi suatu alat yang untuk membina masyarakat dan untuk menarik suara/perhatian dari masyarakat.

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang

¹¹ Ramlan, Op cit Hal :149

¹² Ramlan, Ibid Hal 149 - 154

diperoleh baik secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Yang dimaksud dengan indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

b) Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik adanya rekrutmen politik, dimana ini perlu dilakukan oleh sebuah partai politik mengingat dengan perekrutan politik ini terhadap masyarakat yang bisa menjadikan proses peralihan dalam perpolitikan khususnya generasi muda bangsa Indonesia. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan padakhususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat

sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan.

c) Partisipasi Politik

Partisipasi politik sangatlah dibutuhkan didalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dikarenakan dengan adanya partisipasi politik akan menstabilkan perpolitikan (pemerintahan) atau yang membuat kebijakan baik dalam member saran, maupun mengawasi jalannya pemerintahan. Yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternative pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.

d) Pemadu Kepentingan

Di Indonesia sangat banyak sekali khususnya di masyarakat yang mempunyai kepentingan – kepentingan pribadi yang berbeda – beda dan tentu sering kali tidak sedikit yang bertentangan, seperti mendapatkan keuntungan yang sebanyak – banyaknya maupun kepentingan yang lainnya yang untuk mementingkan diri sendiri. Tentu dengan hal ini jika tidak ada wadah untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat yang berbeda dan bertentangan bisa membuat negara tersebut hancur dengan sendirinya jika tidak bisa mengatasi hal hal tersebut.

Maka perlunya partai politik dibentuk untuk kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan pelbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi pelbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemaduan kepentingan. Sebagaimana dikemukakan di atas, fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan.

e) Komunikasi Politik

Fungsi partai politik yang berikutnya adalah komunikasi politik, komunikasi politik ini sangat penting dijalankan bagi partai politik, dikarenakan dengan adanya komunikasi diharapkan masyarakat dapat mengetahui kondisi perpolitikan tersebut baik mengenai keputusan maupun kebijakan politik, dan juga komunikasi politik ini juga dapat menjadikan wadah aspirasi masyarakat yang untuk menyampaikan isi

hatinya sesuai keinginannya. Yang dimaksud dengan komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada peminintah.

Dengan hal ini, partai politik yang berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

f) Pengendalian Konflik

Fungsi partai politik berikutnya adalah pengendalian konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah dalam arti yang luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar-individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sukar dielakkan.

Dalam hal ini dibentuknya partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu, diperlukan

kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

g) Kontrol Politik

Fungsi parpol yang terakhir adalah kontrol politik. Yang dimaksud dengan Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk melakukan suatu kontrol politik harus didasri dengan adanya tolok ukur yang jelas untuk melihat kegiatan tersebut benar yang bersifat realtif objektif.

Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.

Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolok ukur tersebut sebab tolok itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

Kemudian Ichlasul Amal dalam bukunya mengatakan fungsi partai sebagai berikut¹³ :

a. Integrasi

Yang dimaksud dengan integrasi ialah merupakan beberapa dari suatu keseluruhan fungsi yang esensial yaitu adanya Partisipasi, sosialisasi, mobilisasi. Jadi partai politik juga harus melaksanakan fungsi – fungsi tersebut untuk menjalankan keberlangsungan partai politik.

b. Fungsi dukungan (supportive function)

Fungsi ini adalah partai tidak hanya memobilisasi dan memerintah, tetapi juga harus menciptakan kondisi – kondisi bagi kelangsungan hidup sistem dimana partai tersebut beroperasi. Partai harus menciptakan dukungan pada sistem tersebut.

1.4. Sistem Kepartaian

Pembahasan sistem kepartaian disuatu negara dalam berbagai literature didasarkan pada jumlah partai politik yang memiliki kekuatan sebagai major party, sebagai major party dikenal adanya ssitem sebagai berikut¹⁴ :

a. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai adalah politik dalam suatu negara yang hanya dikuasai oleh suatu partai dominan. Dalam sistem ini mungkin terdapat partai – partai lain, namun kekuatannya tidak signifikan dan hanya ada satu partai yang menguasai

¹³ Ichlasul Amal, *Teori – Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2012 Hal 30 - 33

¹⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 201, hal 58 - 62

pemerintahan. Namun, sistem satu partai juga dapat terjadi dengan dibentuknya satu partai negara yang disertai dengan larangan pembentukan partai lain.

b. Sistem Dua Partai

Sistem dua partai adalah sistem politik suatu negara yang memiliki dua partai utama dengan kemungkinan adanya partai politik lain, namun tidak signifikan. Itu dipastikan hanya ada dua partai yang menguasai parlemen atau membentuk pemerintahan. Terbentuknya partai politik utama terkait dengan adanya sistem dan latar belakang sosial negara tertentu.

c. Sistem Multipartai

Sistem multipartai adalah suatu sistem politik dimana dalam suatu negara tidak terdapat satu partai politik tertentu yang mungkin menjadi mayoritas absolute untuk dapat menguasai lembaga perwakilan atau membentuk pemerintahan tanpa berkoalisi dengan partai lain.

1.5. Faktor Kegagalan Partai

Partai politik tidak akan pernah lepas dari dengan yang namanya komunikasi, sosialisai serta lainnya yang berhubungan dengan masyarakat langsung yang untuk mencari atau membina dukungan dari masyarakat yang untuk menempatkan kekuasaan didalam jabatan - jabatan tertentu. Dengan hal tersebut tentunya para partai politik mencari strategi sedemikian mungkin untuk memenangkan partainya,

namun kali ini penulis tidak akan membahas mengenai strategi, melainkan membahas analisis faktor kegagalan partai dalam pemilihan umum khususnya di pemilihan umum legislatif. Untuk itu faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan dalam partai politik ialah meliputi faktor internal dan faktor eksternal¹⁵:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor kegagalan yang disebabkan oleh partai itu sendiri yang berimbas kepada perolehan suara di dalam pemilihan, hal-hal tersebut diantaranya.

1) Strategi Partai

Strategi adalah salah satu kunci keberhasilan suatu partai untuk memenangkan pemilihan umum jika partai tersebut salah mengambil langkah ataupun strategi maka bisa menjadi pukulan kepada partai tersebut. Banyak beragam strategi yang dilakukan oleh partai demi merebut hati para pemilihnya antara lain :

a) Strategi Penempatan Calon Legislatif

Dalam pertarungan pemilihan umum legislatif tentu calon legislatif sangat diperlukan bagaimana seorang calon memiliki kapasitas yang baik dihadapan masyarakat, namun apabila tidak ada strategi penempatan yang baik dan terstruktur yang melihat dari potensi – potensi tempat para caleg tersebut, maka akan menjadi suatu kesalahan besar terhadap partai jika tidak memperhatikan hal tersebut.

¹⁵ Turtiantoro, L. D., & Utomo, M. D. S. (2013). *ANALISIS KEGAGALAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MEMPEREBUTKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN BATANG*. *Journal of Politic and Government Studies*, 48-63

b) Strategi Komunikasi

Dalam halnya untuk pertarungan di pentas politik partai harus menjalankan strategi komunikasi yang baik terhadap kader maupun kepengurusan agar terjadinya saling mengisi ketidaksempurnaan partai. Dengan adanya komunikasi yang baik antar kepengurusan tentu hal tersebut akan menjadi suatu keberhasilan untuk bergotong royong merebut hati masyarakat.

c) Strategi Menghadapi Isu Negatif

Didalam pertarungan politik tentu adanya black campaign yang dilontarkan oleh pihak – pihak lain yang menghalalkan segala cara untuk mendulang suara bagi partainya, untuk hal tersebut jika tidak ada kesiapan dari partai dalam menghadapi isu tersebut maka partai tersebut akan jelek citranya dimata masyarakat, untuk itu perlu kiranya semua partai mewanti – wanti setiap isu – isu miring yang akan menerpanya.

2) Kader Partai

Kader partai ialah sangat mempengaruhi kegagalannya suatu partai diakibatkan kader partai yang belum merata di daerah - daerah yang terpencil sekalipun dan yang kurang bersosialisasi langsung ke masyarakat. Oleh karena itu tentu partai politik harus mempersiapkan kader – kader terbaik yang ingin bertarung di pentas politik pemilihan umum legislatif yang bersifat membela rakyat demi kepentingan rakyat sehingga partai tersebut mampu mendulang suara dari para

masyarakat. Untuk mendulang suara di hati masyarakat partai politik harus mempersiapkan kader seperti :

a) Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan partai politik harus menenkankan kepada para kadernya untuk mau bersosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menerima manfaat dari kader tersebut baik itu pendidikan maupun dan sebagainya, sehingga dari hal tersebut nantinya diharapkan masyarakat mampu menaruhkan pilihannya kepada kader yang ingin mencalon legislatif tersebut.

b) Memobilisasi massa

Mobilisasi massa dimaksudkan kader haruslah pandai – pandai dalam memobilisasi massa agar massa tersebut diharapkan memilih partai dan caleg tersebut, mobilisasi massa bisa digunakan caleg melalui membuat sebuah perkumpulan atau kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi suatu desa sehingga dari hal tersebut mampu mendulang suara dari kelompok – kelompok tadi.

3) Rekrutmen Kader Partai

Fungsi partai politik yang berupa rekrutmen politik menjadi perhatian utama bagi Partai - partai, melihat dari fungsi rekrutmen politik itu sendiri secara umum yaitu untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Dikarenakan dengan tidak adanya rekrutmen

yang struktur, maka akan menjadi penyebab kegagalan partai tersebut dalam menempatkan kadernya disuatu pemilihan umum. Hal – hal yang harus diperhatikan oleh partai agar rekrutmen kader terstruktur dengan baik dan terarah.

a) Adanya Transparansi

Transparansi dimaksudkan ialah, harus adanya transparan disetiap pengurus dalam melakukan perekrutan jangan sampai dengan adanya kekuasaan akan memasukkan kader – kader yang tidak memiliki potensi yang tadinya ingin menjadikan citra partai yang baik melainkan sebaliknya merusak nama partai hal tersebut harus diperhatikan sebuah partai demi menjaga nama baik partai dan hati para masyarakat.

b) Adanya Rekrutmen Terstruktur

Yang dimaksudkan adalah partai harus membuat suatu standar untuk merekrutmen kader, agar kader yang direkrut tidak sembarangan masuk kedalam partai tersebut tentu dari hal tersebut nantinya diharapkan menjadikan partai yang diinginkan oleh masyarakat yang membela kepentingan masyarakat.

4) Sosialisasi partai.

Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada.

Sosialisasi partai bisa jadi salah satu kegagalan partai dalam pemilihan umum, dengan tidak adanya sosialisasi politik yang terstruktur masyarakat tidak akan mengenal kader kader yang akan diusung oleh suatu partai. Untuk hal tersebut partai harus adanya mengadakan sebagai berikut :

a) Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang dimaksud adalah partai harus memberikan pelajaran – pelajaran politik terhadap masyarakat kemudian memberitahu tentang kegiatan – kegiatan politik yang sedang berjalan sehingga masyarakat tidak merasa diabaikan jadi adanya kedekatan antara partai dan masyarakat sehingga masyarakat pun mampu memberikan keluhannya untuk pemerintah ataupun untuk apa yang diinginkannya.

b) Kampanye

Dalam halnya pertarungan di pentas politik kampanye adalah salah satu yang harus dilakukan oleh partai agar para kader – kader yang diusung oleh partai dapat dikenali oleh masyarakat, untuk itu partai harus berekstra keras untuk mensosialisasikan kader agar dikenali oleh masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi bukan karena partai itu sendiri melainkan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi kegagalan partai politik tersebut, diantaranya:

1) Perilaku Memilih Masyarakat.

Karakteristik pemilih masyarakat biasanya terjadi beberapa jenis yaitu, yang pertama paternalistik. Paternalistik disini maksudnya adalah pemilih mengikuti saran dan rekomendasi dari tokoh masyarakat, seperti halnya para santri mengikuti apa yang dikatakan oleh kyai tersebut, dan yang kedua adalah pemilih yang bersifat kekeluargaan. Sifat kekeluargaan ini maksudnya adalah pemilih akan mendukung orang yang mencalonkan jika calon tersebut memiliki hubungan saudara, tetangga dengan pemilih, meskipun partai – partai lain sering melakukan sosialisasi namun masyarakat merasa kurang mengena di masyarakat sehingga hal ini menjadi tidak ada arti bagi partai tersebut.

Selain itu menurut Surbakti ada 5 pendekatan perilaku memilih masyarakat dilihat dari pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial, dan pilihan rasional.¹⁶:

- a) Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.
- b) Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Artinya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.

¹⁶ Ramlan, Op cit Hal: 186-188

- c) Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- d) Psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai – partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
- e) Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah.

Sedangkan menurut Firmanzhah¹⁷ membedakan perilaku pemilih masyarakat :

- a) Pemilih rasional. Jenis pemilih rasional memiliki orientasi tinggi pada *policy proble solving*, dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Selain itu, pemilih lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon kontestan dalam program kerjanya. Program kerja tersebut dapat dilihat dalam dua hal, yakni kinerja di masa lampau dan tawaran program untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada. Di sisi lain, pemilih rasional

¹⁷Kurniawan, D. (2015). *PENGARUH HASIL SURVEI TENTANG ELEKTABILITAS CAPRES-CAWAPRES 2014 TERHADAP PERILAKU PEMILIH DI SURABAYA*. Jurnal Review Politik, 5(1), 126-151.

memiliki ciri khas yang tidak begitu memeningkan faktor ideologi suatu partai politik atau kandidat tertentu. Hal yang terpenting dalam menentukan pilihannya, pemilih rational melihat apa yang bisa dilakukan oleh partai atau kandidat, daripada paham atau nilai partai dan kandidat tertentu.

- b) Pemilih kritis. Pemilih kritis merupakan jenis pemilih yang memadukan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa dan tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi jenis pemilih ini, bisa terjadi melalui dua mekanisme: 1) jenis pemilih yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai politik atau kandidat mana yang mereka pilih; 2) pemilih akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan dan bisa juga terjadi sebaliknya. Pemilih akan tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan yang kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan.
- c) Pemilih tradisional. Pemilih tradisional memiliki orientasi ideologi yang tinggi dan tidak terlalu melihat hasil kebijakan yang telah dibuat oleh partai atau kandidat dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kandidat.

d) Pemilih skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kandidat tertentu. Di sisi lain, mereka juga kurang mempedulikan program kerja atau “*platform*” dan kebijakan partai politik.

2) Faktor Money Politics

Dengan adanya pemilihan umum secara langsung maka hal ini dijadikan sebuah ajang berlomba – lomba untuk menarik simpati masyarakat dengan menghalalkan segala cara, istilah money politics sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat, bahkan jika partai tidak menggunakan money politik maka hal tersebut akan berpengaruh dalam perolehan suara.

Dalam money politics sebenarnya yang terjadi di Indonesia tidak hanya berbentuk uang melainkan :

- a) Barang, barang sebagaimana dimaksud adalah pemberian yang diberikan oleh para calon dengan memberi kerudung, beras, kain sarung dan sebagainya. Dengan demikian dengan adanya pemberian barang tersebut para calon meminta dukungan perolehan suara.
- b) Kelompok, Sebagaimana dimaksud para calon memberikan sarana misalnya pembangunan jalan terhadap suatu desa maupun dusun, kemudian para calon memberikan fasilitas olahraga kepada muda - mudi yang bertujuan untuk mendulang suara.

3) Citra Partai

Dengan adanya citra partai sangat menjadi penentu bagi kemenangan maupun kegagalan suatu partai dikarenakan jika citra partai tersebut yang selama ini baik maka masyarakat akan memilih partai itu namun sebaliknya jika partai tersebut mempunyai riwayat yang buruk akan menjadi kegagalan bagi partai tersebut.

Pendapat lain mengatakan faktor penyebab kegagalannya partai dalam pemilihan umum legislatif disebabkan oleh¹⁸ :

a. Faktor Internal

1) Kesiapan Caleg.

Disini dimaksudkan para caleg harus siap dicalonkan dalam pemilihan umum tanpa adanya suatu paksaan maupun adanya suatu tekanan dari pihak – pihak tertentu, dikarenakan dengan adanya suatu paksaan akan mempengaruhi caleg dalam bertarung, tentu caleg tersebut tidak sepenuh hati dalam mengambil hati masyarakat. Untuk itu perlu kiranya kesiapan caleg yang matang.

2) Kerendahan Hati Caleg.

Setiap caleg yang ingin maju dalam pertarungan politik harus kiranya ada kerendahan hati yang dimilikinya baik itu untuk partai maupun untuk kepentingan

¹⁸ <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/2948/2634> (Rabu 23 desember 2015 Pukul 15.15)

masyarakat, jika hal tersebut tidak ada didiri caleg tentu akan menyebabkan kegagalan komunikasi maupun keagal partai, contohnya caleg tidak loyal kepada partai, kemudian arogan terhadap masyarakat tentu ini akan menyebabkan masyarakat tidak menyukai caleg tersebut yang menyebabkan kegagalan caleg dan partai.

b. Faktor Eksternal

1) Tidak adanya dukungan dari masyarakat

Disini dimaksudkan kegagalan partai politik dalam pemilihan umum dapat terjadi disebabkan oleh caleg yang dicalonkan, mungkin karena kurang sosialisasi, kurangnya menarik perhatian masyarakat, dan mungkin adanya citra yang buruk di masyarakat dan sebagainya sehingga menyebabkan tidak adanya dukungan dari masyarakat.

a) Kurang Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat yang ingin memilih tidak mengenali para kader sehingga menyebabkan masyarakat tidak akan memilih kader tersebut akibatnya akan menjadi sebuah kegagalan yang dialami oleh caleg dan partai tersebut.

b) Citra Buruk

Setiap kader tentu harus menjaga citranya dengan baik agar selalu menarik perhatian oleh masyarakat, jika citra kader ataupun partai tersebut diterpa isu tidak

sedap otomatis masyarakat akan mengalihkan suaranya terhadap partai lain, tentu hal tersebut merugikan caleg maupun sebuah partai politik.

2) adanya kecurangan – kecurangan dalam pemilu.

Kecurangan – kecurangan di dalam pemilu mempunyai banyak cara, tentu dari kecurangan tersebut membuat suatu caleg bisa gagal dalam memperebutkn kursi wakil rakyat, adapun kecurangan – kecurangan tersebut sebagai berikut :

a) Money Politics

Money politics adalah salah satu hal yang paling ampuh dalam mendulang suara partai, jika terdapat money politics disuatu pemilihan umum dapat mengancam caleg – caleg yang tidak memiliki money politics, dikarenakan masyarakat sekarang mengatakan tidak ada uang tidak ada suara, tentu hal tersebut membuat caleg yang tidak menggunakan money politics akan mengalami kekalahan.

b) Manipulasi Suara

Manipulasi suara adalah salah satu penyebab kegagalan caleg untuk duduk di kursi wakil rakyat, hal tersebut masih banyak didapatkan di daerah – daerah Indonesia dengan berbagai cara sering kali memanipulasi suara untuk memenangkan suatu caleg tersebut, untuk hal tersebut perlu kiranya caleg harus memberikan kepercayaan kepada orang – orang yang dipercayainnya untuk menjadi saksi disetiap – setiap (tps) yang daerah pemilihannya agar suara yang dimilikinya tidak hilang.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan dari pada demokrasi.¹⁹

Kegiatan pemilihan umum ialah kegiatan yang harus oleh negara dikarenakan dalam pemilihan umum salah satu fungsinya ialah dapatnya sarana penyaluran hak asasi warga negara. Hak asasi warga negara ialah harus utama negara – negara yang ada di dunia ini khususnya negara Republik Indonesia dikarenakan negara itu terbentuk disebabkan oleh karena adanya warga negara dan oleh karena itu negara wajib melindungi, mengasihi, mengayomi hak – hak warga negara yang dihidup di negara tersebut. Dan oleh karena itu, untuk melaksanakan kegiatan pemilihan umum dan menjamin penyelenggaraannya sesuai yang sudah ditentukan oleh undang – undang negara harus melaksanakan kegiatan pemilihan umum dengan sebaik – baiknya, karena dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum masyarakat tidak akan pernah hilang untuk mengaspirasikan keinginannya.

¹⁹Sukriono, D. (2009). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 2(1).

a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya adalah sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Sedangkan J. Blondel menyebutkan bahwa pemilu sebagai simbol demokrasi dan kedaulatan rakyat, melalui pemilu lembaga perwakilan rakyat dibentuk. Carl Friedrich mendefinisikan pemilu sebagai sarana memberikan kepada rakyat kesempatan mengekspresikan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap pelayanan pejabat-pejabat penting²⁰.

b. Lembaga Pemilihan Umum

Dalam demokrasi sistem perwakilan yang dianut oleh negara modern khususnya Indonesia maka akan dibentuknya badan – badan perwakilan rakyat atau disebut dengan lembaga. Maksud dibentuknya lembaga – lembaga tersebut ialah untuk menjadikan sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya melalui wakil – wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Lembaga pemilihan umum adalah sistem norma dalam proses penyampaian hak demokrasi rakyat. Pengertian ini akan menunjuk pada jalinan kaidah-kaidah dan unsur-unsur yang masing-masing satu dengan yang lainnya berhubungan erat, saling berketergantungan dan bilamana salah satu kaidah atau unsur diantara kaidah-kaidah atau unsur-unsur tadi tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi

²⁰ Turtiantoro, L. D., & Utomo, M. D. S. (2013). *ANALISIS KEGAGALAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MEMPEREBUTKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN BATANG*. *Journal of Politic and Government Studies*, 48-63.

keseluruhannya. Demikian juga pengertian pemilihan umum sebagai suatu proses, menunjuk pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah –kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya²¹.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Dalam Pasal 22E ayat 5 di tentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (1) nasional, (2) tetap, dan (3) mandiri atau independen.

Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah disebutkan undang – undang yaitu harus mandiri atau independen melakukan penyelenggaraan yang harus bersifat netral dan tidak boleh memihak satu sama lain. Memang melakukan perbaikan terhadap jalannya proses pemilihan umum adalah tanggung jawab semua kalangan, namun tidak dapat dielakkan bahwa komisi pemilihan umumlah yang harus memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan proses pemilihan secara adil dan efisien, tidak jarang ketidakadilan akan menjadi sumber malapetaka bagi proses pemilu itu sendiri²²

²¹ Sukriono, D. (2009). *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 2(1).

²² Firman Subagyo, *Menata Partai Politik (Dalam Arus Demokratisasi Indonesia)*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2009 Hal : 131

Dalam halnya pemilihan umum harus adanya tahap tahap yang harus diikuti meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih.

c. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Umum

Di Indonesia sudah berulang kali diadakannya pemilihan umum, setidaknya ada dua sistem pelaksanaan pemilihan umum yang dipakai, yaitu sebagai berikut²³ :

1) Sistem Distrik

Sistem ini perlokasi (daerah pemilihan) dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan, jadi banyak jumlah suara akan terbuang. Tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akrab dengan wakilnya. Satu distrik biasanya satu wakil.

2) Sistem Proporsional

Sistem ini perjumlah penduduk pemilih. Misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh 1 wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah sekelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yang dikenal lewat tanda gambar, sehingga wakil dan pemilih kurang akrab. Tetapi bisa dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan. Dengan begitu partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi, karena suara pemilih dihargai.

²³ Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hal : 109

d. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum tentu mempunyai tujuan – tujuan salah satunya ialah pergantian posisi jabatan, memperbaiki kinerja kepemimpinan yang sebelumnya serta menjadikan terlaksananya penyaluran aspirasi rakyat. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu²⁴ :

- 1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- 2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- 3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tujuan pertama mengandung pengertian pemberian kesempatan yang sama kepada para peserta pemilihan umum untuk memenangkan pemilihan umum, yang juga berarti para peserta mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan program-programnya. Tujuan kedua maksudnya adalah memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (*elected public officials*). Dalam hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan memungkinkan di sini tidak berarti bahwa setiap kali dilaksanakan pemilihan umum, secara mutlak harus berakibat terjadinya pergantian pemerintahan atau pejabat negara.

²⁴ Sukriono, D. Op cit

Tujuan ketiga dan keempat pemilihan umum itu adalah juga untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantaraan wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara dengan benar menurut UUD adalah hak rakyat yang sangat fundamental.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.²⁵

3. Pemilihan Legislatif

Pemilu merupakan momen untuk memilih para wakil – wakil rakyat sebagai bentuk pengakuan akan kedaulatan rakyat, seperti yang terdapat dalam undang – undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah. : Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

²⁵Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal, 6.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pemilu legislatif adalah sarana demokrasi yang dilakukan oleh negara sebagai perwujudan langsung untuk menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih wakil – wakilnya (anggota legilatif) yang untuk duduk dalam pemerintahan (DPR). Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu ciri Negara demokratis adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil wakil mereka khususnya di lembaga legislatif dikarenakan menurut teori yang berlaku, rakyat lah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh rousseau disebut *volonte generale* atau *genral will*). Keputusan – keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *genral will* itu. Karena itu keputusan –

keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang – undang mengikat seluruh masyarakat.²⁶

Berikut ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam pemilu legislatif tahun 2014 yang menagcu kepada undang undang No 8 tahun 2012, yang berbeda dengan ketentuan pada pemilu legislative sebelumnya, yaitu :

1. Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik (pasal 8). Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.
2. Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu, Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, Pendaftaran sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang lengkap (pasal 14)
3. Hak memilih, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana

²⁶Budiardjo, op. cit hal :315

dimaksud pada penyelenggara Pemilu hanya 1 kali didaftar dalam daftar Pemilih.

4. Jumlah anggota DPR 560 kursi (pasal 21). Jumlah anggota untuk DPRD provinsi tetap yakni paling sedikit 35 dan paling banyak 100 (pasal 23 ayat 1). Sedangkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). Daerah pemilihan DPRD tidak berubah, yakni daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan: dan DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota (pasal 24 ayat 1) dan (pasal 27 ayat 1).
5. bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia (pasal 51 ayat 1)
6. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. (pasal 52 dan pasal 54).

E. Definisi Konsepsional

Definisi Konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian mengenai konsep lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman

atau kerancuan. Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partai politik adalah organisasi yang dibuat oleh warga negara yang secara suka rela yang berusaha untuk menduduki suatu jabatan atau suatu kekuasaan yang untuk memperjuangkan kepentingan anggota maupun bangsa dan negara.
2. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemilihan Legislatif adalah proses memilih yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga Legislatif (DPRD)

F. Definisi Operasional

Adapun untuk melihat dan mengetahui faktor – faktor kegagalan yang ada didalam Partai Golkar, maka perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini agar terarah dengan baik dan jelas, yaitu dilihat berdasarkan kerangka teori yang sebelumnya sudah rumuskan dan dicermati.

Adapun faktor – faktor kegagalan tersebut antara lain :

1. Faktor kegagalan
 - a. Internal

- 1) Strategi Partai
 - 1.1 Strategi Penempatan Caleg
- 2) Kader Partai
 - 2.1 Kualitas Kader
- 3) Sosialisasi Partai
 - 3.1 Kuantitas Sosialisasi Politik

b. Eksternal

- 1) Perilaku Memilih Masyarakat
 - 1.1 Budaya Perilaku Pemilih
- 2) Faktor Money Politics

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Laporan tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara , catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.²⁷

²⁷Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2012. Hal 11

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu. Dikarenakan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Partai Golkar mengalami kegagalan pada periode tersebut tentu dari hal tersebut ada hal – hal yang mempengaruhi terhadap kegagalan Golkar pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk itu perlu kiranya ditanyakan kepada pengurus – pengurus partai Golkar penyebab kegagalan partai Golkar dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.

3. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2) Data sekunder.

Data sekunder merupakan data tambahan dengan menggunakan bahan – bahan yang dianggap relevan diperoleh dari buku-buku, literature dan peraturan perundang – undangan atau dokumentasi lain.

4. Unit Analisis

Dalam penelitian yang diteliti, bisa suatu individu atau bisa juga suatu kelompok. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengurus DPD partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini meneliti Wakil ketua DPD Partai Golkar, Sekretaris Umum Partai Golkar, Bendahara Umum Partai Golkar, Simpatisan Partai Golkar, dan Calon legislatif yang gagal dari Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumen – dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat untuk melengkapi penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk memenuhi data yang dibutuhkan penulis akan mewawancarai pengurus – pengurus Partai Golkar :

- 1) Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu
- 2) Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu
- 3) Sekretaris Umum Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu

- 4) Bendahara Umum Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu
- 5) Calon legislatif yang gagal dari partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu
- 6) Simpatisan Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengutip atau meneliti dokumen - dokumen atau bahan yang tertulis lainnya maupun sebuah film yang tersedia dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan dokumen-dokumen, catatan-catatan, ataupun arsip-arsip, partai dilakukan dengan meminta kepada pihak Partai Golkar di tingkat Kabupaten Labuhanbatu. Data-data ini antara lain adalah Data kader partai Golkar, dan data-data ketercapaian partai Golkar dalam pemilihan legislatif tahun 2014.
- 2) Pengumpulan catatan - catatan, ataupun arsip - arsip mengenai hasil notulensi terkait strategi partai Golkar, dilakukan dengan meminta data kepada pengurus Golkar Kabupaten Labuhanbatu.
- 3) Pengumpulan rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dilakukan dengan meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

- 4) Pengumpulan artikel maupun pemberitaan - pemberitaan terkait kegiatan Partai Golkar di Kabupaten Labuhanbatu, dilakukan dengan mengutip pemberitaan-pemberitaan di media elektronik maupun cetak.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung obyek penelitian. Di dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati beberapa hal, yakni :

- 1) Mengamati adanya kepentingan dikubu internal partai Golkar dalam menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Labuhanbatu
- 2) Mengamati faktor kegagalan partai Golkar di masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menggunakan Deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara data yang dikumpulkan berupa kata – kata yang berasal dari naskah wawancara terhadap informan, kemudian dari naskah wawancara tersebut akan ditarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kesuatu yang bersifat umum.